

**LAPORAN PENELITIAN  
KELEMBAGAAN LANJUT**



**PENGEMBANGAN MATAKULIAH BERPRAKTIK  
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**Dra. Siti Aisyah, M.Si  
Drs. Enceng, M.Si  
Anto Hidayat, S.I.P., M.Si**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN KELEMBAGAAN LANJUT**

**Judul Penelitian** : Pengembangan Matakuliah Berpraktik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
**Kode>Nama Rumpun Ilmu** :

**Ketua Peneliti:**

a. Nama Lengkap : Dra. Siti Aisyah M.Si  
b. NIDN : 0012066807  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
e. Nomor HP : 081218270178  
f. Alamat surel (e-mail) : aisyah@ut.ac.id

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap : Drs. Enceng M.Si  
b. NIDN :  
c. Perguruan Tinggi : FISIP/Universitas Terbuka

**Anggota Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap : Anto Hidayat, S.I.P, M.Si  
b. NIDN : 0014077501  
c. Perguruan Tinggi : FISIP/Univversitas Terbuka

**Lama Penelitian Keseluruhan** : 1 Tahun

**Penelitian Tahun** : 2014

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp. 30.000.000

**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 30.000.000

Tangerang Selatan, 28 Februari 2014

Mengetahui,  
Dekan FISIP – UT,

Ketua Peneliti,

( Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D.)  
NIP. 19640722 198903 1 019

( Dra. Siti Aisyah, M.Si)  
NIP. 196806121999032001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

( Ir. Kristanti Ambar Puspitasari Ph.D)  
NIP. 196102121986032001

## **Kata Pengantar**

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran bagi kami dalam menyelesaikan Laporan Penelitian Pengembangan Matakuliah Berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) yang telah mempercayakan kesempatan ini kepada kami.
- b. Dekan FISIP-UT yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian ini
- c. Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.Si an dosen-dosen di IPDN yang telah banyak memberikan masukan dan sejawat dalam mendiskusikan pengembangan materi praktik tersebut
- d. Kepala UPBJJ-UT Semarang beserta rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan kesempatan berdiskusi bagi penyusunan laporan tersebut.
- e. Rekan-rekan dosen di FISIP-UT yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian tersebut.
- f. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dari pembaca untuk memperbaiki laporan ini sangat kami harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tangerang, Desember 2014

Tim Peneliti

## RINGKASAN

Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IPEM) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT) adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu pemerintahan pada jenjang Strata 1 dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh. Pengembangan matakuliah berpraktik/praktikum pada PS IPEM FISIP-UT memiliki urgensi yang signifikan dengan pengembangan PS IPEM. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemerintah, pengguna lulusan dan masyarakat terhadap pentingnya peningkatan kualifikasi lulusan program sarjana Ilmu Pemerintahan, di samping adanya instrumen borang Program Studi yang menanyakan substansi matakuliah berpraktik/praktikum.

Sampai dengan tahun 2014, kurikulum pada PS IPEM belum memiliki matakuliah yang menuntut praktik dan praktikum. Pada sisi yang lain, peminatan masyarakat terhadap PS IPEM pada FISIP UT dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan matakuliah berpraktik pada PS IPEM FISIP-UT.

Hasil Penelitian menunjukkan rumusan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT belum selaras dengan esensi dari ilmu pemerintahan. Penguasaan mahasiswa dalam memahami pemerintahan sebagai ilmu dan seni mengisyaratkan tidak hanya pada tataran dalam penguasaan teori dan konsep semata, namun juga pentingnya mengedepankan ketrampilan dan perilaku sikap dalam menghadapi gejala-gejala pemerintahan. Oleh karena itu PS Ilmu Pemerintahan perlu merealisasikan dalam menerapkan praktik dalam beberapa matakuliahnya.

*Keywords: pengembangan, praktik, pemerintahan*

## DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	
	1
Halaman Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Ringkasan	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB III METODE PENELITIAN	13
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	15
A. Esensi Ilmu Pemerintahan	15
B. Analisis Kompetensi dan Tujuan PS Ilmu Pemerintahan	18
C. Kemungkinan Pengembangan Matakuliah Berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan	23
D. Pengembangan Materi Praktik pada Matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota	24
E. Kelebihan dan Kekurangan Praktik	32
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	37
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IPEM) merupakan salah satu program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ubuversitas Terbuka (FISIP-UT) yang didirikan berdasarkan ijin operasional Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Nomor 251/DIKTI/Kep/1996. Penyelenggaraan pembelajaran PS IPEM dimulai pada tahun 1999. PS IPEM adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu pemerintahan pada jenjang Strata 1 dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh. PS IPEM berada di bawah naungan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT.

Sesuai dengan Katalog UT 2014, salah satu tujuan PS IPEM FISIP UT adalah menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu pemerintahan sehingga mampu berfikir secara ilmiah; dasar-dasar metodologi ilmu pemerintahan sehingga mampu mengembangkan ilmu pemerintahan; menerapkan dasar ilmu dan metodologi ilmu pemerintahan untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pemerintahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kompetensi yang diharapkan dari lulusan S1 PS Ilmu Pemerintahan adalah kemampuan analisis dalam menerapkan konsep dan teori di bidang pemerintahan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat dengan praktek-praktek *good governance*.

Kompetensi kelulusan ini erat kaitannya dengan capaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan IPK (indek prestasi kumulatif). Berdasarkan hasil Exit Survey PS IPEM tahun 2013, IPK mahasiswa PS S1 Ilmu Pemerintahan rata-rata berkisar di atas 2.0 dan 2.5, bahkan di beberapa UPBJJ-UT telah mencapai IPK 3.0 dan yang paling menonjol adalah UPBJJ-UT Pangkal Pinang. Namun dilihat secara keseluruhan mahasiswa yang capaian di atas IPK 2.0-2.5. Dengan IPK yang rata-rata di atas 2.0-2.5 maka standar kelulusan mahasiswa PS S1 Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat menganalisis masalah-masalah kehidupan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan menurut data yang ada di SRS UT, sampai dengan Februari 2014, jumlah lulusan PS IPEM adalah sebesar 1.615 lulusan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pendidikan program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya
- b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
- c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; serta
- d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Untuk mencapai tujuan program studi disusun kurikulum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembelajaran. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas: (a). Kurikulum inti dan (b). Kurikulum institusional.

Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciiri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang

harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Sedangkan kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kurikulum yang ditawarkan pada PS IPEM merupakan kurikulum tunggal. Beban studi mahasiswa PS IPEM ditetapkan sebesar 145 sks, yang tersebar dalam 34 (102 sks) matakuliah inti, 13 matakuliah pendukung (39 sks), Tugas Akhir Program/TAP (4 sks) dan Karya Ilmiah. Keseluruhan matakuliah yang ada di PS IPEM FISIP-UT adalah murni matakuliah yang berbentuk uraian teori, konsep dan pengetahuan dan belum ada matakuliah yang mensyaratkan praktik.

Struktur kurikulum yang ada tersebut tentunya kurang mendukung pencapaian kualifikasi lulusan program studi sarjana seperti diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, khususnya pada pentingnya lulusan dalam menguasai kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. Selain itu, matakuliah yang mempunyai substansi praktikum/praktik merupakan salah satu instrumen penilaian Borang PS (Instrumen 5.14). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan matakuliah yang memiliki substansi praktikum/praktik guna mendukung pencapaian kualifikasi lulusan sarjana pada PS IPEM-FISIP-UT.

## **B. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah kompetensi PS Ilmu Pemerintahan ditinjau dari esensi ilmu pemerintahan dan apakah sudah memenuhi standar KKNI ?
- b. Bagaimana pandangan pakar dan UPBJJ-UT selaku pihak operasional mengenai kemungkinan pengembangan matakuliah berpraktik pada PS IPEM FISIP-UT?
- c. Bagaimana pengembangan materi praktik pada salah satu matakuliah pada kurikulum PS IPEM FISIP-UT?
- d. Apa saja kelebihan dan kekurangan praktik dalam koridor pendidikan jarak jauh?



### **C. Tujuan Dan Manfaat**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kompetensi dan tujuan program studi dengan berdasarkan pada esensi ilmu pemerintahan
- b. Mengetahui pandangan pakar ilmu pemerintahan dan operasional pelaksana pembelajaran di UPBJJ mengenai kemungkinan matakuliah yang dapat dikembangkan sebagai matakuliah berpraktik pada PS IPEM FISIP-UT
- c. Mengembangkan materi praktik pada salah satu matakuliah pada kurikulum PS IPEM FISIP-UT

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kesesuaian rumusan kompetensi dan tujuan program studi IPEM dengan esensi ilmu pemerintahan.
- b. Menyediakan alternatif materi praktik pada matakuliah PS Ilmu Pemerintahan
- c. Memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan mengenai pentingnya matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan
- d. Menambah wawasan dalam mengembangkan nmatakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pendidikan merupakan kebutuhan terus menerus sepanjang manusia hidup. Untuk keperluan pendidikan kadangkala orang harus menghadapi kendala dalam memperoleh kesempatan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik kendala usia, ruang dan waktu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi secara jarak jauh (*Open Distance Learning*) umumnya dilatarbelakangi oleh adanya keinginan sebuah perguruan tinggi untuk melayani masyarakat secara lebih luas. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perguruan tinggi sistem konvensional atau tatap muka menghadapi kendala ruang dan waktu. Mereka hanya dapat melayani masyarakat atau mahasiswa yang bisa hadir ke kampus secara teratur (Wahyono: 2004). Oleh karena itu, Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) merupakan suatu pilihan yang tidak bisa dihindari.

### **Kurikulum Pembelajaran Jarak Jauh**

PS IPEM merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan sarjana dengan model pendidikan tinggi jarak jauh. Pada sebagian mahasiswa PTJJ umumnya tidak siap mengubah kultur belajar dari pembelajaran terbimbing, seperti pada tatap muka, menjadi pembelajaran independen dalam PTJJ (Carr, Ed. 1999; Kadarko, 2002; dalam Yunus dan Pannen, 2004). Asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar, karena PTJJ umumnya didesain untuk mendidik dan membantu mahasiswa menjadi pembelajar mandiri. Di antaranya, melalui program pembelajaran mandiri dengan bahan ajar yang didesain untuk membelajarkan mahasiswa (Simpson, 2000; dalam Yunus dan Pannen, 2004).

Sebagaimana perguruan tinggi konvensional, program pembelajaran pada PS IPEM dituangkan pada kurikulum pembelajaran program sarjana. Definisi kurikulum secara luas dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 yang mendefinisikan kurikulum pendidikan tinggi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi. Secara sempit, Suparman (2012) mendefinisikan kurikulum sebagai daftar matakuliah atau matapelajaran yang terorganisasi dengan logis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pada program studi yang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran matakuliah disampaikan melalui bahan ajar yang didesain sesuai dengan kaidah

pembelajaran jarak jauh. Pada UT materi pembelajaran disajikan dalam Buku Materi Pokok (BMP) atau lazim disebut modul UT. Menurut Lockwood (1998), bahan ajar PTJJ yang berkarakter membelajarkan diri pembelajar, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Belajar individual, yakni mahasiswa dapat belajar sendiri tanpa harus menunggu jumlah tertentu untuk membentuk kelompok belajar.
- b) Belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu atau tempat tertentu. Pembelajar dapat memutuskan sendiri waktu dan tempat belajar yang diinginkan sesuai dengan keadaannya.
- c) Materi ajar terstandar, maksudnya semua mahasiswa menerima dan menggunakan bahan dan materi ajar yang sama.
- d) Pengajaran yang terstruktur, artinya sajian bahan ajar ditata sedemikian rupa yang mencerminkan strategi pembelajaran yang diperkirakan paling efektif dan efisien.
- e) Belajar aktif, yakni setiap individu belajar melalui pengalaman belajar yang bermakna dengan bertolak dari ide-ide atau topik-topik yang disajikan, daripada sekedar menelan apa yang diceritakan tentang ide-ide itu.
- f) Memiliki balikan yang memungkinkan mahasiswa secara terus-menerus memperoleh masukan untuk membantunya memonitor dan memperbaiki kemajuan belajarnya.
- g) Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sehingga mahasiswa dapat memahami kompetensi yang mesti dicapainya.
- h) Penggunaan bahasa bersifat interaktif dan personal untuk menciptakan situasi komunikasi yang akrab, dekat dan dialogis.

Menurut Suparman (2012), pihak yang menentukan kurikulum adalah pemerintah atau kelompok pakar yang ditunjuk oleh pemerintah. Sesungguhnya pengajar, penyelenggara, dan penanggungjawab satuan pendidik barulah sebagian pihak yang berhak menentukan kurikulum. Pihak lain yang seyogyanya terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah peserta didik dan masyarakat pengguna lulusan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian pembelajaran, proses pembelajaran didukung oleh beberapa komponen, antara lain perpustakaan yang berfungsi dan lengkap, laboratorium dan tempat praktikum yang berdaya guna, tenaga kependidikan, serta manajemen satuan pendidikan yang fasilitatif. (Suparman:2012). Perpustakaan yang berfungsi dengan baik sebagai sumber belajar dan lengkap (*resourceful*) dapat mengangkat peserta didik menjadi

lulusan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, dan pada gilirannya bila mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk kebutuhan praktis, maka akan membuatnya siap memasuki lapangan kerja. Laboratorium adalah kebutuhan pokok bagi matakuliah atau matapelajaran tertentu. Laboratorium tidak terbatas yang berada di dalam ruang tertutup. Ilmu sosial banyak membutuhkan laboratorium yang ada di lapangan, di lingkungan masyarakat, diberbagai instansi pemerintah dan perusahaan. Peserta didik ilmu politik, hukum, dan sejarah perlu menyaksikan rapat-rapat DPR-DPRD, penyelenggaraan pengadilan dan kunjungan ke museum. Tenaga kependidikan dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada peserta didik dan pengajar. Untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran, tenaga kependidikan melakukan berbagai pekerjaan yang menyangkut pengaturan penggunaan ruang kelas, peralatan pendidikan, ruang laboratorium, dan tempat sosialisasi. Manajemen satuan pendidik yang fasilitatif merupakan komponen yang menyediakan sarana dan prasarana, suasana kerja para pegawai, baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan alternatif matakuliah yang dapat dikembangkan sebagai matakuliah berpraktik, mengetahui pandangan mahasiswa, pakar dan UPBJJ-UT mengenai kemungkinan penyediaan matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan, serta bagaimana mengembangkan matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan.

Pengembangan model matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan didesain berdasarkan masukan dari pakar, mahasiswa, dan UPBJJ-UT yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran jarak jauh dengan mengintegrasikan berbagai kemungkinan yang dapat digunakan untuk mengembangkan model matakuliah berpraktik.

### **B. Variabel**

Variabel yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah:

- a) Kesesuaian tujuan Program Studi dan kompetensi dengan esensi ilmu pemerintahan
- b) Pandangan pakar dan UPBJJ-UT tentang matakuliah berpraktik pada PS IPEM
- c) Alternatif matakuliah berpraktik yang dapat dikembangkan
- d) Pengembangan materi praktik matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota pada PS Ilmu Pemerintahan.

### **C. Teknik Pengambilan Data**

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melalui wawancara secara mendalam dengan para informan, pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan maupun kegiatan yang terjadi di lapangan. Penentuan informan dilaksanakan dengan teknik *purposive sampling*. UPBJJ-UT yang dipilih adalah berdasarkan pada pertimbangan kemudahan dalam komunikasi, ketersediaan Pokjar Ilmu Pemerintahan serta keberadaan alumni PS IPEM.

Kajian dokumentasi juga dilakukan terhadap berbagai dokumen yang dianggap terkait dan relevan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dengan melalui wawancara secara mendalam dengan informan ini direkam langsung di tempat penelitian atau di lapangan. Data yang terekam kemudian ditranskrip dan dilakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a) *coding* (pengelompokkan data), b) penguraian data kualitatif melalui teknik deduksi, abstraksi dan refleksi, c) melakukan pemaknaan data yang didasarkan atas pendekatan atau metodologis *interpretative social science*. Dalam analisis penelitian ini dilakukan teknik triangulasi dalam rangka melakukan cek silang (*crosscheck*) sehingga diharapkan agar hasil analisisnya lebih meyakinkan dan bersifat obyektif. Wawancara yang mendalam dilakukan dengan : (1). Pakar PS Ilmu Pemerintahan; (2). Kepala UPBJJ-UT atau Koordinator BBLBA-UT ; (3). Mahasiswa; dan (4). Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan matakuliah berpraktik.

#### **D. Tahapan Pengembangan Program**

Tahapan pengembangan model matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan adalah sebagai berikut.

- a. Pendangan pakar dan UPBJJ-UT terhadap kemungkinan disediaknnya matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan.
- b. Pengidentifikasian dan pemilihan matakuliah berpraktik yang dapat dikembangkan pada PS Ilmu Pemerintahan
- c. Pembuatan rancangan matakuliah berpraktik matakuliah yang dipilih pada PS Ilmu Pemerintahan yang sesuai dengan kaidah pembelajaran jarak jauh,
- d. Penilaian hasil secara *one to one* dan *small group* melalui Focus Discussion Group (FGD).
- e. Perbaikan rancangan sesuai masukan hasil diskusi, baik secara *one to one* dan *small group*
- f. Finalisasi rancangan matakuliah yang dipilih untuk pengembangan praktik pada PS Ilmu Pemerintahan

## **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini berisi temuan dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimanakah kompetensi lulusan Program S1 Ilmu Pemerintahan yang telah dirumuskan oleh PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT. Sebelum menganalisis lebih jauh tentang kompetensi lulusan Program S1 Ilmu Pemerintahan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai esensi ilmu pemerintahan, subyek materia dan fokus dari ilmu pemerintahan.

### **A. Esensi Ilmu Pemerintahan**

Sebelum menguraikan mengenai esensi ilmu pemerintahan, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari ilmu. Menurut Soetrisno Hadi, ilmu adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan dari sejumlah orang yang dipadukan secara harmonis dalam suatu bangunan yang teratur. The Liang Gie mendefinisikan ilmu sebagai sekelompok pengetahuan yang teratur yang membahas suatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran . Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa ilmu harus ada obyeknya, terminologinya yang khas, methodologinya yang khas, filosofis yang khas, dan teori yang khas.

Tidak semua ilmu dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto mengatakan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Sondang Siagian mengatakan ilmu pengetahuan mempunyai obyek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. Sedangkan van Poelje (1953) mengatakan ilmu pengetahuan sebagai kesatuan pengetahuan, dimana masing-masing bagian bergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

ilmu pengetahuan itu kongkrit sehingga dapat diamati, dipelajari serta teruji kebenarannya, teratur bersifat khas dalam arti mempunyai metodologi, obyek, sistematika, dan teori sendiri.

Dalam penerapannya ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi ilmu murni, ilmu praktis (terapan) dan ilmu campuran. Ilmu murni adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan berorientasi pada teorisasi, hanya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak yaitu mempertinggi mutunya. Sedangkan ilmu praktis (*applied science*) adalah ilmu yang langsung dapat diterapkan kepada masyarakat. Sedangkan ilmu campuran adalah suatu ilmu yang termasuk ilmu murni juga ilmu terapan praktis langsung dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum.

Setelah mengetahui pengertian ilmu pengetahuan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintahan dapat disebut sebagai sebuah ilmu? Jika ya, pertanyaan selanjutnya adalah apa subyek materia dan formanya, dan termasuk dalam kategori ilmu murni, terapan ataupun campuran. Berikut dibahas tentang pemerintahan.

Berkaitan dengan pemerintahan, Van Poelje (1953) mengatakan “*De bestuursleer als leer van het overheidshandelen*” (Ajaran pemerintahan sebagai ajaran tentang perbuatan pemerintah, dan perumusan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa “*De bestuurskunde leert hoe men openbare dienst het beste inricht en leidt*” (ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin dinas-dinas umum sebaik mungkin). Mac Iver berpendapat “*There is an important body of systematic knowledge about the state, about the conditions under which different types of government emerge, about the characteristics of the different types, about the relations of the government to the governed in the different historical situations, about the modes in which government carry out on their functions according to their kind, and so forth. This body of knowledge may properly be named a science*” (ada kumpulan pengetahuan yang sistematis tentang negara, tentang keadaan yang timbulnya berbagai type pemerintahan, tentang hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dalam keadaan sejarah yang berbeda, tentang cara-cara pemerintah melaksanakan fungsinya sesuai dengan jenisnya, dan seterusnya. Kumpulan pengetahuan ini secara tepat dapat dinamakan ilmu pengetahuan). Sedangkan menurut Samuel Edward Finer, istilah government paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu:

- a. menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*)



- b. menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*)
- c. menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charg with the duty of government*)
- d. menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*) (dalam S. Pamudji,1985:24-25)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menunjuk (berkaitan dengan) pada organ, badan, lembaga atau alat perlengkapan negara, sedang pemerintahan menunjuk pada bidang tugas atau fungsi dari pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintahan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Untuk memperjelas pengertian tentang ilmu pemerintahan maka ada baiknya kita mengetahui definisi dari ilmu pemerintahan.

Van Poelje mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. U. Rosenthal (dalam Labolo: 2008:9) memberikan batasan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal serta eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Brasz mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana dinas pemerintahan/pelayanan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap para warganya. Sedangkan Sadu Wasistiono mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara negara dan rakyatnya dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Singkatnya ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala pemerintahan, yaitu gejala yang berkaitan dengan organisasi serta berfungsinya dinas pemerintahan umum di dalam semua aspeknya, baik ke dalam maupun keluar di dalam kerangka perilaku antara pemerintah dan yang diperintah.

Wawancara dengan pakar pemerintahan (Nov 2014) menyatakan bahwa

“.....selain sebagai ilmu mandiri, pemerintahan juga dikatakan sebagai seni memerintah....”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Ndraha (2003) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat. Dalam mensejahterakan masyarakat

pemerintah menyelenggarakan kepemimpinan pembuatan kebijakan, memberikan pelayanan , dengan berlandaskan pada azas, etika, dan ekologi. Oleh karena itu, pemerintahan dapat dikatakan sebagai seni memerintah. Singkatnya ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala pemerintahan. Gejala pemerintahan adalah peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dari hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, yang dapat diidentifikasi memimpin, mengatur, merencanakan, membina, mengurus, melayani, membuat keputusan, melaksanakan, mengamankan, membangun, .memberdayakan, dan mengomunikasikan berbagai hal yang berkaitan antara yang memerintah dan yang diperintah. Oleh karena itu lah pemerintahan sering dikatakan sebagai seni memerintah.

Uraian mengenai pengertian ilmu pemerintahan tersebut di atas menjadi dasar dalam merumuskan kompetensi hasil pembelajaran bagi institusi yang menyelenggarakan pendidikan tentang pemerintahan, termasuk PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT. Berkaitan dengan hal itu, maka uraian di bawah ini akan menganalisis mengenai kompetensi umum dan khusus yang diharapkan dari lulusan serta tujuan dari PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT.

## **B. Analisis Kompetensi Dan Tujuan PS Ilmu Pemerintahan**

PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT yang menyelenggarakan pendidikan S1 di bidang pemerintahan sejak tahun 1996. Dalam Katalog Kurikulum Program Non Pendas Universitas Terbuka 2014 dinyatakan visi, misi, tujuan PS dan kompetensi yang diharapkan dari lulusan PS IPEM. Visi PS IPEM yang diturunkan dari visi UT dinyatakan sebagai

“ Menjadi program studi ilmu pemerintahan terunggul di Indonesia pada tahun 2015 dan terunggul di dunia pada tahun 2021 dengan model pembelajaran terbuka jarak jauh “

Sedangkan misi PS IPEM-FISIP UT dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat sarjana bidang Ilmu Pemerintahan dengan sistem pembelajaran terbuka jarak jauh yang bisa diikuti oleh semua orang;
2. Menyelenggarakan penelitian keilmuan dan terapan bidang Ilmu Pemerintahan untuk memperkuat disiplin Ilmu Pemerintahan dan memberikan sumbangan praktis kepada penyelenggara pemerintahan;
3. Menjalani kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang ilmiah dan aplikatif;

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan alumni;
5. Menciptakan materi pembelajaran (cetak, audio, audio-visual, dan materi terunggah di internet) yang berstandar internasional sebagai materi utama dan pendukung dalam sistem pembelajaran jarak jauh;
6. Mengembangkan model *e-learning* Ilmu Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh;
7. Meningkatkan layanan tutorial *online* yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

Tujuan Program PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT dinyatakan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang menguasai konsep dan teori ilmu pemerintahan sebagai dasar berperilaku ilmiah baik dalam sikap maupun dalam mengembangkan ilmu pemerintahan;
2. Menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang dapat mengimplementasikan konsep dan teori Ilmu Pemerintahan dalam kegiatan pemerintahan dan memecahkan masalah yang terjadi di dalamnya;
3. Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian hibah bersaing, penelitian strategi nasional, tulisan di jurnal terakreditasi, dan buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit nasional;
4. Menghasilkan buku panduan untuk pengabdian kepada masyarakat;
5. Menghasilkan buku materi pokok berstandar internasional PTJJ sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku dengan konten sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir;
6. Menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk audio/audio-visual dan materi pembelajaran yang dapat diunggah, dan *download* di internet untuk mempermudah mahasiswa memahami materi yang tersaji dalam buku materi pokok;
7. Menghasilkan model *e-learning* ilmu pemerintahan yang dapat diikuti oleh semua mahasiswa secara mudah;
8. Menghasilkan model tutorial *online* yang makin mudah diakses oleh mahasiswa sebagai wahana konsultasi dan diskusi mahasiswa dengan dosen/tutor secara jarak jauh.

Berdasarkan uraian dari tujuan PS Ilmu Pemerintahan, maka dapat dilihat bahwasannya rumusan tujuan program studi masih terlihat kurang memperhatikan pandangan pemerintahan

sebagai ilmu yang mandiri dan pemerintahan sebagai seni (art). Menurut pakar ilmu pemerintahan dan ahli bahasa Indonesia tujuan yang dirumuskan tersebut masih bercampur aduk dengan metode, cara pembelajaran, dan strategi yang digunakan oleh institusi pembelajaran. Strategi merupakan bagaimana melaksanakan sesuatu dan petunjuk dalam mencapai tujuan (Ermaya S: 2013).

Selain itu menurut Siregar dan Nara (2010) dalam Suparman (2012:69) menyatakan tujuan pembelajaran khususnya pembelajaran berbasis kompetensi adalah menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa ketrampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan.

Berkaitan dengan kompetensi, Freden dan Nilson (2003) menjelaskan kompetensi sebagai kemampuan mengerjakan apa yang perlu dilakukan pada saat berhubungan kerja secara produktif dengan orang lain dan lingkungan mereka. Suparman (2012) menjelaskan lebih lanjut pengertian kompetensi sebagai kinerja yang ditunjukkan oleh kemampuan dari hasil menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku.

Untuk memperjelas analisis tentang tujuan program studi ilmu pemerintahan perhatikan Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. : Analisis dari Tujuan PS IPEM**

No	Tujuan PS IPEM	Tambah/kurang	Dasar Teori
1	Menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang menguasai konsep dan teori ilmu pemerintahan sebagai dasar berperilaku ilmiah baik dalam sikap maupun dalam mengembangkan ilmu pemerintahan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumusan sebaiknya diperluas dengan mengedepankan konsep dan teori ilmu pemerintahan</li> </ul>	Defenisi ilmu pemerintahan van Poelje, Mc Iver, Brass, dan Waisitiono
2.	Menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang dapat mengimplementasikan konsep dan teori Ilmu Pemerintahan dalam kegiatan pemerintahan dan memecahkan masalah yang terjadi di dalamnya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep dan teori tidak tepat diimplementasikan namun diterapkan atau diaplikasikan</li> <li>Implementasi lebih kepada pelaksanaan kebijakan atau program yang sudah direncanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defenisi implementasi Kamus Bahasa Indonesia, Yus Badudu</li> </ul>

3	Menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian hibah bersaing, penelitian strategi nasional, tulisan di jurnal terakreditasi, dan buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit nasional;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian dari strategi PS.</li> <li>• Tujuan program pembelajaran adalah menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas</li> </ul>	Defenisi tujuan pembelajaran Siregar dan Nara (2010:67) dan defenisi strategi (Ermaya.S :2013)
4	Menghasilkan buku panduan untuk pengabdian kepada masyarakat;	Idem	Defenisi tujuan pembelajaran Siregar dan Nara (2010:67) dan defenisi strategi (Ermaya.S :2013)
5	Menghasilkan buku materi pokok berstandar internasional PTJJ sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku dengan konten sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir;	Idem	Defenisi tujuan pembelajaran Siregar dan Nara (2010:67) dan defenisi strategi (Ermaya.S :2013)
6	Menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk audio/audio-visual dan materi pembelajaran yang dapat diunggah, dan <i>download</i> di internet untuk mempermudah mahasiswa memahami materi yang tersaji dalam buku materi pokok;	Idem	Defenisi tujuan pembelajaran Siregar dan Nara (2010:67) dan defenisi strategi (Ermaya.S :2013)
7	Menghasilkan model <i>e-learning</i> ilmu pemerintahan yang dapat diikuti oleh semua mahasiswa secara mudah	Idem	
8	Menghasilkan model tutorial <i>online</i> yang makin mudah diakses oleh mahasiswa sebagai wahana konsultasi dan diskusi mahasiswa dengan dosen/tutor secara jarak jauh.	Idem	

Sumber: Katalog Non Pendas 2014 , literatur dan hasil FGD dengan pakar

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka tujuan PS Ilmu Pemerintahan sebaiknya direvisi menjadi:

Selain tujuan program studi, uraian berikut akan menganalisis kompetensi yang dirumuskan oleh PS IPEM FISIP-UT. Berdasarkan Katalog 2014, maka rumusan kompetensi umum dan khusus adalah sebagai berikut:

*Kompetensi Umum Lulusan PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT:*

*Lulusan S1 program studi Ilmu Pemerintahan mampu menganalisis masalah-masalah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan konsep dan teori ilmu pemerintahan.*

*Kompetensi Khusus:*

- 1. Mampu menjelaskan konsep-konsep dan teori yang menjadi landasan ilmu pemerintahan;*
- 2. Mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang ilmu pemerintahan;*
- 3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan;*
- 4. Mampu melakukan penelitian di bidang pemerintahan;*
- 5. Menganalisis masalah-masalah kehidupan sosial yang berkembang dalam masyarakat.*

Tabel 2 berusaha menjelaskan analisis kompetensi umum dan khusus pada PS IPEM-FISIP UT.

**Tabel 2: Analisis Kompetensi Lulusan PS IPEM**

*“Tujuan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT adalah menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang pemerintahan melalui program pembelajaran jarak jauh”*

No	Kompetensi	Tambah/Kurang	Dasar Teori/Alasan
1.	Umum: Lulusan S1 program studi Ilmu Pemerintahan mampu menganalisis masalah-masalah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan konsep dan teori ilmu	Analisis: Pemerintahan sebagai ilmu dan seni. Perlu ditambahkan : menerapkan ilmu	Pemerintahan dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. (Mc Iver, van Poelje, Brass, dan Waisitiono.

	pemerintahan.	pemerintahan Konsep dan teori dihapus	Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala- gejala pemerintahan (ilmu dan seni).
Kompetensi Khusus			
1	Khusus: Mampu menjelaskan konsep-konsep dan teori yang menjadi landasan ilmu pemerintahan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu pemerintah mempelajari gejala-gejala pemerintahan.</li> <li>• Perlu ditingkatkan menjadi analisis</li> </ul>	Defenisi Ilmu Pemerintahan Robert Mc Iver, van Poelje, dan Brass
2	Mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang ilmu pemerintahan;	Aplikasi ilmu pemerintahan dalam hidup bermasyarakat	Defenisi pemerintahan
3	Mampu menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan;	Tujuan tsb sebaiknya dihapus, karena <i>good governance</i> hanya merupakan salah satu paradigma dalam ilmu pemerintahan	Defenisi pemerintahan
4	Mampu melakukan penelitian di bidang pemerintahan;	Cukup	Defenisi Pemerintahan dan tujuan
5	Menganalisis masalah-masalah kehidupan sosial yang berkembang dalam masyarakat	No. 5 sudah tercakup dalam no.2	

*Sumber: Katalog 2014, literatur dan pendapat pakar*

Tujuan pembelajaran dan kompetensi sebaiknya berada dalam satu garis lurus. Oleh karena itu, berdasarkan diskusi dengan pakar pemerintahan dan ahli bahasa Indonesia, maka rekomendasi rumusan kompetensi umum dan khusus adalah

Sedangkan kompetensi khusus merupakan penjabaran dari kompetensi umum, yang dirumuskan sebagai berikut:

*Kompetensi Khusus Lulusan PS Ilmu Pemerintahan*

1. *Mampu menganalisis gejala-gejala pemerintahan berdasarkan teori dan konsep pemerintahan.*
2. *Mampu menerapkan teori dan konsep pemerintahan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat*
3. *Mampu menghasilkan karya ilmiah di bidang pemerintahan*

**C. Kemungkinan Pengembangan Matakuliah Berpraktik Pada PS Ilmu Pemerintahan**

Pada

Kompetensi Umum :

Lulusan S1 Ilmu Pemerintahan FISIP-UT mampu mengaplikasikan ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat

bagian di atas telah diuraikan pengertian tujuan pembelajaran dan kompetensi lulusan., serta fokus kajian dari ilmu pemerintahan. Tujuan pembelajaran dan kompetensi lulusan dioperasionalkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Kurikulum S1 PS Ilmu Pemerintahan terdiri dari 145 sks, yang terbagi ke dalam 34 matakuliah kompetensi utama (102 sks), 13 matakuliah kompetensi pendukung (39 sks), dan Tugas Akhir Program (TAP) dan Karya Ilmiah.

Kurikulum yang dianut oleh PS Ilmu Pemerintahan adalah kurikulum tunggal dan belum ada matakuliah yang bernuansa praktik yang dipersyaratkan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Padahal menurut pengertian kompetensi tersebut di atas, kompetensi mencakup pengetahuan, ketrampilan dan perilaku sikap. Di samping itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.



Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pendidikan program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya
- b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
- c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; serta
- d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PS IPKM FISIP UT perlu mengembangkan beberapa matakuliah praktik untuk menunjang capaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk dapat melaksanakan praktik dibutuhkan laboratorium yang berfungsi menunjang praktikum. Dalam kaitannya dengan pentingnya laboratorium sebagai salah satu komponen penunjang dalam melaksanakan program pembelajaran, Suparman (2012) menjelaskan bahwa laboratorium tidak hanya terbatas yang berada dalam ruang tertutup. Ilmu sosial banyak membutuhkan laboratorium yang berada di lapangan, di lingkungan masyarakat. Di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan. Peserta didik ilmu politik, hukum dan sejarah, misalnya perlu menyaksikan rapat-rapat DPR-DPRD, penyelenggaraan pengadilan dan kunjungan ke museum. Kerjasama antara pengajar, pengelola laboratorium, serta pengelolaan satuan pendidikan, sangat diperlukan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pembelajaran.

Pemikiran tersebut menunjukkan pentingnya matakuliah praktik untuk menunjang capaian pembelajaran yang berbasis kompetensi. Menurut pakar ilmu pemerintahan, pengembangan matakuliah berpraktik pada kurikulum PS Ilmu Pemerintahan sangat dimungkinkan. Tabel 3 berikut merupakan hasil resume dari diskusi dengan pakar ilmu pemerintahan.

**Tabel 3: Kemungkinan Pengembangan Matakuliah Praktik pada PS IPKM**

No	Matakuliah	Materi Praktik	Lokasi/laboratorium	Kompetensi
1.	IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota	Perencanaan dalam pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan	Menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan teori
2	IPEM4208 Sistem Pemerintahan Desa	Administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Kantor Kelurahan/Desa	Menyusun, mengkoordinasikan, mengomunikasikan administrasi pemerintahan desa atau kelurahan
3	IPEM4323 Legislatif Indonesia	Peraturan Daerah	Kantor DPRD kabupaten/Kota	Menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan daerah sebagai bagian dari kebijakan publik
4	IPEM4207 Metodologi Ilmu Pemerintahan	Proposal Penelitian	Instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan	Membuat proposal penelitian pemerintahan

*Sumber: Rangkuman diskusi dengan pakar pemerintahan, Nov 2014*

Berpijak dari hasil diskusi dengan pakar pemerintahan tersebut, pengembangan matakuliah berpraktik pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT menentukan pilihan pada matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Adapun alasan pemilihan matakuliah tersebut adalah selain matakuliah tersebut pernah dikembangkan pada program *Continu Education (CE)* yang berbasis praktik dengan segmen aparatur desa (Sekdes), juga kemungkinan kemudahan dalam melaksanakan praktik di beberapa lokasi praktik di kantor instansi pemerintah, antara lain: di Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan atau Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berikut adalah rancangan pengembangan praktik pada matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota.

#### **D. Pengembangan Materi Praktik Pada Mk IpeM4542 Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota**

Pengembangan praktik pada matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota difokuskan pada materi perencanaan pembangunan. Pengembangan rancangan ini merupakan pengembangan dari materi pengajaran dari program *Continu Education (CE)*,

yakni program bersertifikat dengan segmen aparatur pemerintahan desa/kelurahan, khususnya para Sekretaris Desa, yang pada umumnya masih berijazah SLTA. Capaian pembelajaran program tersebut dihargai Sertifikat yang dapat dialihkreditkan (diakui oleh Program Studi) ke dalam salah satu matakuliah dalam kurikulum.

Berikut rancangan pengembangan materi Continue Education tersebut.

## RANCANGAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN PERFORMA

Nama Program : Continue Education (CE)  
 Mata Kuliah : Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (IPEM4542)  
 Disusun Oleh : Siti Aisyah/Enceng/Anto Hidayat  
 Penelaah :

KOMPETENSI UMUM	KOMPETENSI KHUSUS	ASPEK DINILAI	FOKUS PENILAIAN	BENTUK TUGAS	RAMBU PENILAIAN	BOBOT SKORING	Komentar/
Peserta mampu menganalisis partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa dan kota di Indonesia	Peserta Program Administrasi Pemerintahan Umum mampu menerapkan konsep pembangunan desa di lingkungan pemerintahan desa	1. Menjelaskan isi Modul 1, 2, 3, 4, dan 9	Meringkas Modul 1,2,3,4, dan 9	1. Buatlah Ringkasan Modul 1,2,3,4, dan 9 dari BMP IPEM4542 2. Mempresentasikan hasil rangkuman di depan kelas.	1. Ringkasan yang dibuat sangat lengkap (konsep dan teorinya disusun tidak ada yang terlewatkan dan ditulis dengan bahasa yang padat dan efektif) 2. Ringkasan yang dibuat lengkap (konsep dan teorinya ditulis secara lengkap) 3. Ringkasan yang dibuat agak lengkap (konsep dan teorinya ditulis masih ada yang sedikit tertinggal) 4. Ringkasan yang dibuat kurang	Sesuai dengan Rambu Penskoran	

					<p>lengkap (konsep dan teorinya ditulis secara lengkap)</p> <p>5. Ringkasan yang dibuat tidak lengkap (konsep dan teorinya ditulis tidak lengkap)</p>		
		<p>2. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan di desa dan merencanakan solusinya (Teori ada di Modul 4 BMP IPEM4542)</p>	<p>1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan di desa</p> <p>2. Menyusun rencana dan solusinya</p> <p>3. Menyusun Skala Prioritas Pembangunan Desa</p>	<p>1. Mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan di desa masing-masing</p> <p>2. Mengisi Lembar Kerja Rencana Pembangunan di desa</p> <p>3. Mengisi Lembar Kerja Skala Prioritas Pembangunan</p>	<p>1. Isian yang dibuat sangat lengkap</p> <p>2. Isian yang dibuat lengkap</p> <p>3. Isian yang dibuat agak lengkap</p> <p>4. Isian yang dibuat kurang lengkap</p> <p>5. Isian yang dibuat tidak lengkap</p>	Sesuai dengan Rambu Penskoran	

		3. Menerapkan model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (Materi Modul 2 BMP IPEM4542)	1. Menjelaskan unsure masukan/input 2. Menjelaskan proses musrenbang 3. Menjelaskan output/keluaran musrenbang	1. Mengisi Lembar Kerja Input Musrenbang 2. Mengisi Lembar Kerja Proses Musrenbang 3. Mengisi Lembar Kerja Output/Keluaran Musrenbang	1. Isian yang dibuat sangat lengkap 2. Isian yang dibuat lengkap 3. Isian yang dibuat agak lengkap 4. Isian yang dibuat kurang lengkap 5. Isian yang dibuat tidak lengkap	Sesuai dengan Rambu Penskoran	

Adapun sifat dari materi *Continue Education* tersebut adalah dapat dialihkreditkan (diakui) oleh program studi dengan bobot 3 sks. Namun sebagai materi praktik dari matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, yang dirancang untuk mahasiswa S1 PS Ilmu Pemerintahan materi tersebut terlalu berat dan terlalu luas. Berikut petikan wawancara dengan pakar ilmu pemerintahan sebagai berikut:

“.....materi praktik seperti itu berat untuk mahasiswa S1, untuk S2 pun masih agak berat. Sebaiknya ditetapkan kompetensi yang ingin dicapai apa....misalnya mahasiswa dapat menyusun perencanaan pembangunan /musrenbang dengan menggunakan salah satu teori pembangunan....”

Berdasarkan pendapat pakar dan hasil diskusi mengenai pengembangan materi praktik, maka pengembangan praktik untuk matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota dirancang sebagai berikut:

**RANCANGAN PENGEMBANGAN MATERI PRAKTIK  
PADA MK IPEM4542 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KOTA**

Nama Program : Praktik Mata kuliah  
Mata Kuliah : Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (IPEM4542)  
Disusun Oleh : Siti Aisyah/Enceng/Anto Hidayat

KOMPETENSI UMUM	KOMPETENSI KHUSUS	ASPEK DINILAI	FOKUS PENILAIAN	BENTUK TUGAS	RAMBU PENILAIAN	BOBOT SKORING
Mahasiswa mampu mendiskripsikan kegiatan perencanaan pembangunan berdasarkan teori	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan teori pembangunan 2. Mengaplikasikan kegiatan perencanaan pembangunan berdasarkan teori pembangunan	1. Penguasaan teori 2. Diskripsi Kegiatan Pembangunan berdasarkan teori	Kualitas penjabaran tulisan dalam menerapkan teori Pembangunan dalam kegiatan perencanaan pembangunan	1. Membuat diskripsi kegiatan Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan di tempat Anda tinggal dan analisislah dengan teori pembangunan yang Anda ketahui 2. Mempresentasi kan hasil rangkuman di depan kelas.	1. Diskripsi yang dibuat sangat lengkap (konsep dan teorinya disusun tidak ada yang terlewatkan dan ditulis dengan bahasa yang padat dan efektif) 2. Diskripsi yang dibuat lengkap (konsep dan teorinya ditulis secara lengkap) 3. Diskripsi yang dibuat agak lengkap (konsep dan teorinya ditulis masih ada yang sedikit tertinggal) 4. Diskripsi yang dibuat kurang lengkap (konsep dan teorinya ditulis secara lengkap) 5. Diskripsi yang dibuat tidak lengkap (konsep dan teorinya ditulis tidak lengkap)	Sesuai dengan Rambu Penskoran

*Sumber: Hasil Diskusi dengan pakar dan BMP IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*



## E. Kelebihan Dan Kekurangan Praktik

Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dinyatakan bahwa secara nasional setiap program studi yang sejenis seharusnya menghasilkan lulusan dengan kompetensi atau learning outcomes yang standard meskipun dihasilkan melalui cara dan kegiatan pembelajaran yang berbeda (*different pathways - standardized output/outcomes*). Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) diperoleh melalui internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi merupakan "capaian pembelajaran minimum" yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merepresentasikan "profil lulusan". Profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan tentang "program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa" Profil lulusan adalah "peran" yang diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan di dunia kehidupan. Peran ini bisa menunjuk kepada suatu profesi atau jenis pekerjaan yang khusus atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum yang dicanangkan oleh program studi suatu perguruan tinggi.

Berkaitan dengan tuntutan KKNI tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan perlu menerapkan metode pembelajaran Praktek. Metode ini merupakan sebuah metode pembelajaran dimana mahasiswa melaksanakan kegiatan latihan atau praktek atau pengalaman praktek agar memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari teori yang telah dipelajari. Metode pembelajaran praktek dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di lapangan, yang bisa berarti di tempat kerja maupun di masyarakat. Praktek merupakan upaya untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung. Ide dasar belajar berdasarkan pengalaman, mendorong mahasiswa untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami. Selama praktek, mahasiswa diharapkan mampu melihat, mengamati, memahami, membandingkan dan memecahkan suatu masalah saat kegiatan praktek dilaksanakan.

Praktek merupakan suatu pelaksanaan dari teori dalam keadaan nyata, suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi

Pemerintahan setempat. Praktek akan menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Melalui praktek, mahasiswa akan mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek, mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki; mahasiswa akan memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan. Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional nantinya. Praktek menjadi media pengaplikasian dari teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke tempat kerja. Melalui praktek, mahasiswa akan lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. Praktek akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. Di samping itu, melalui praktek akan meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi . Praktek dapat menjadi media promosi lembaga terhadap institusi kerja. Kualitas lembaga perguruan tinggi dapat terukur dari kualitas para mahasiswa yang melaksanakan praktek tersebut. Selain itu, dapat membantu institusi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja akademis yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dimilikinya.

Sementara itu, pengalaman kerja merupakan serangkaian kegiatan yang diprogramkan untuk membentuk dan membina kompetensi-kompetensi profesional yang disyaratkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah kepribadian calon profesional yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta pola tingkah laku yang diperlukan bagi profesinya serta cakap dan tepat menggunakannya di dalam menyelenggarakan profesinya. Pengalaman kerja merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup latihan bidang tertentu maupun tugas-tugas di luar bidang tertentu secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan profesi. Pengalaman kerja berorientasi pada kompetensi; terarah pada pembentukan kemampuan-kemampuan profesional; dilaksanakan, dikelola dan ditata secara terbimbing dan terpadu .

Penggunaan metode pembelajaran haruslah disesuaikan dengan materi/ bidang studi yang diajarkan dan kondisi mahasiswa. Oleh sebab itu, tidak baik jika pendidik langsung menerapkan sebuah metode pembelajaran tanpa memperhatikan kedua hal tersebut. Hal itu pula yang menyebabkan sebuah metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi

batasan pengaplikasiannya. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran praktek:

a. Kelebihan

- Mahasiswa langsung dihadapkan pada permasalahan nyata, yaitu praktek;
- Keterampilan mahasiswa meningkat atau lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari dari teori yang disampaikan dengan melakukan praktek;
- Seorang mahasiswa benar-benar memahami apa yang disampaikan
- Diperolehnya perubahan perilaku ranah psikomotor dalam bentuk keterampilan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya kelak;
- Meningkatkan motivasi dan gairah belajar mahasiswa karena pekerjaan yang dilakukan memberikan tantangan baru baginya;
- Meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa tentang profesionalisme yang dimilikinya.

b. Kekurangan

- Memerlukan persiapan yang matang dan biaya yang tinggi baik untuk pengadaan bahan dan peralatan praktek maupun pengoprasian serta pemeliharaan peralatan praktek;
- Memerlukan instruktur/ pembimbing yang benar-benar terampil dalam melakukan pekerjaan yang akan dipraktikkan oleh mahasiswa;
- Mahasiswa memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai kompetensi standar yang diperlukan di lapangan kerja sebenarnya.

Pada sisi lain, semua program studi termasuk Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Universitas Terbuka (UT) menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ). PJJ bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. PJJ antara lain memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan TIK pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya. Dalam konteks penerapan metode pembelajaran praktek pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, mengacu pada Simonson dkk. (2006) ada empat komponen peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu

- a. *Institutionally Based* adalah adanya lembaga penyelenggara. Ini merupakan konsep utama daripada pendidikan jarak jauh untuk membedakannya dengan belajar sendiri (self-study) dan otodidak. Lembaga ini adalah Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan praktek melalui pendidikan jarak jauh.

- b. *Separation of Teachers and Students* adalah adanya keterpisahan antara mahasiswa dengan dosen/tutor. Keterpisahan ini bisa dilihat dari sisi lokasi maupun waktu. Artinya, pembelajaran praktek disampaikan oleh dosen/tutor kepada mahasiswa yang terpisah jarak dan waktu, sehingga pembelajaran praktek bisa lebih adaptif.
- c. *Interactive Telecommunication* adalah digunakannya sistem telekomunikasi interaktif. Terjadinya komunikasi jarak jauh adalah konsekuensi dari keterpisahan antara mahasiswa dan dosen/tutor. Oleh karena itu keberadaan sistem telekomunikasi yang interaktif ini sangat penting karena kunci dari proses pembelajaran termasuk praktek adalah adanya interaksi. Interaksi dengan memanfaatkan sistem telekomunikasi ini dapat bersifat asinkronous (tidak bersamaan) maupun sinkronous (bersamaan), baik dilihat dari sisi tempat dan waktu.
- d. *Sharing of Data, Voice, Video* adalah adanya *sharing* baik data, suara dan video yang memungkinkan pengalaman belajar terjadi. Maksudnya adalah obyek belajar (*learning objec*) yaitu substansi praktek dikemas dalam bentuk video maupun multimedia. Media pembelajaran tersebut dirancang sesuai dengan prosedur desain pembelajaran praktek.

Namun demikian, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan jika Program Studi Ilmu Pemerintahan akan menerapkan metode pembelajaran praktek sebagaimana diungkapkan Kepala UPBJJ-UT Semarang. Aspek-aspek tersebut antara lain meliputi :

- Kontrol Kualitas :

Praktek adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram dan terbimbing atau mandiri. Agar kegiatan praktek dapat terjamin kualitasnya, maka pelaksanaan praktek harus dimonitor oleh pengelola program studi atau oleh UPBJJ-UT. Di samping itu, program studi harus mempersiapkan pedoman dan panduan praktek secara komprehensif.

- Sumber Daya Manusia :

Kegiatan praktek dilaksanakan di bawah bimbingan instruktur/supervisor/pembimbing. Hal ini berarti pengelola program studi atau UPBJJ-UT harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan substansi matakuliah berpraktek tersebut. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk instruktur/supervisor/pembimbing merupakan tantangan tersendiri bagi UPBJJ-UT.

- Sarana dan Prasarana:

Praktek dilaksanakan di institusi lain sesuai dengan substansi praktek yang memiliki sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang ditetapkan program studi dalam pedoman penyelenggaraan praktek. Penyiapan instansi tempat praktek yang memadai menuntut UPBJJ-UT untuk melakukan kerjasama dengan berbagai instansi. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai ini juga berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik. Bagi UPBJJ-UT tertentu hal ini mendatangkan kesulitan tersendiri.

- Sistem Evaluasi :

Mata kuliah berpraktek pada Program Studi Ilmu Pemerintahan adalah mata kuliah yang nilai akhirnya ditentukan oleh nilai praktek dan UAS. Hal ini berarti akan merubah komposisi penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa. Di samping itu, Pusat Komputer harus menyesuaikan aplikasi sistem penilaian yang semula hanya ditentukan oleh UAS.

## **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

1. Esensi dari ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala pemerintahan, yaitu gejala yang berkaitan dengan organisasi serta berfungsinya dinas pemerintahan umum di dalam semua aspeknya, baik ke dalam maupun keluar di dalam kerangka perilaku antara pemerintah dan yang diperintah. Gejala pemerintahan adalah peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dari hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, yang dapat diidentifikasi memimpin, mengatur, merencanakan, membina, mengurus, melayani, membuat keputusan, melaksanakan, mengamankan, membangun, .memberdayakan, dan mengomunikasikan berbagai hal yang berkaitan antara yang memerintah dan yang diperintah. Oleh karena itu lah pemerintahan sering dikatakan sebagai seni memerintah.
2. Tujuan program studi dan kompetensi lulusan yang diharapkan, yang telah ditetapkan oleh PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT belum sejalan dengan esensi dari ilmu pemerintahan. Tujuan dan kompetensi yang dirumuskan masih bercampur baur dengan metode, cara dan strategi dalam pembelajaran.
3. Kemungkinan dalam mengembangkan materi praktik untuk menunjang pencapaian kompetensi pada lulusan PS Ilmu Pemerintahan terbuka luas, yakni dengan memanfaatkan laboratorium di lapangan, seperti instansi pemerintah, kantor kepala desa/kelurahan, DPRD, kantor pemerintah daerah, dan lain sebagainya.
4. Rancangan pengembangan materi praktik untuk matakuliah IPEM4542 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota difokuskan pada kualitas mahasiswa dalam mendiskripsikan kegiatan perencanaan pembangunan berdasarkan pada teori yang ada.
5. Praktek akan menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Praktek sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional. Praktek akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. Di

samping itu, melalui Praktek akan meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi .

## **B. Rekomendasi**

1. Program studi Ilmu Pemerintahan perlu mengkaji secara terus-menerus dalam menghadapi perkembangan ilmu pemerintahan, agar dalam menetapkan tujuan dan kompetensi dapat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan perlu merumuskan kembali tujuan program studi dan kompetensi lulusan yang diharapkan dengan mendasarkan pada esensi ilmu pemerintahan.
3. Program Studi Ilmu Pemerintahan perlu mengkaji kemungkinan-kemungkinan dalam mengembangkan materi praktik untuk menunjang capaian pembelajaran yang maksimal.
4. a. Program Studi Ilmu Pemerintahan perlu menetapkan substansi materi matakuliah berpraktek yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi yang diinginkan program studi dan menetapkan sistem penilaian matakuliah berpraktek.  
b. Program Studi Ilmu Pemerintahan perlu membuat pedoman dan panduan pelaksanaan praktek secara komprehensif  
c. Program Studi Ilmu Pemerintahan atau UPBJJ-UT perlu mengidentifikasi dan menetapkan tempat praktek yang memadai, instruktur/supervisor/pembimbing yang kompeten, dan memonitor pelaksanaan praktek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asandhimitra, dkk. 2004. *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Iver. Mc. 1985. *Jaring-Jaring Pemerintahan*. Terj. Jakarta: Aksara Baru
- Labolo, Muhadam (Ed). 2008. *Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing
- Neuman, W. Laurence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach*. Pearson Education, Inc.
- Poelje, Van G.A. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. Terj. Djakarta: NV Soeroengan
- Suparman, Atwi & Zuhairi, Aminudin. 2004. *Pendidikan Jarak Jauh Teori dan Praktek*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Suparman, M.Atwi. 2012. *Desain Instruksional Modern*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan. Strategi Pengambilan Keputusan*. Jatinangor: Cakrawala Baru Dunia Buku.
- Wahyono, dkk. (Ed). 2004. *Universitas Terbuka Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

### Jurnal Ilmiah:

Jurnal Admistrasi Pemerintahan Daerah. Vol VI, Edisi ke-1 2014.

### Laporan Penelitian:

Laporan Exit Survey PS Ilmu Pemerintahan FISIP-UT. 2013. Tidak diterbitkan



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **Instrumen Penelitian**

### **Pengembangan Model MK Berpraktik PS IPEM FISIP-UT**

#### **A. PAKAR ILMU PEMERINTAHAN (2 orang)**

Pertanyaan:

- a. Tujuan PS IPEM FISIP UT adalah menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu pemerintahan sehingga mampu berfikir secara ilmiah; dasar-dasar metodologi ilmu pemerintahan sehingga mampu mengembangkan ilmu pemerintahan; menerapkan dasar ilmu dan metodologi ilmu pemerintahan untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pemerintahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu?
- b. Kompetensi yang diharapkan dari lulusan S1 PS Ilmu Pemerintahan adalah kemampuan analisis dalam menerapkan konsep dan teori di bidang pemerintahan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat dengan praktek-praktek *good governance*. Berikan komentar Bapak mengenai kompetensi tersebut di atas!
- c. Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan dan kompetensi lulusan PS IPEM FISIP-UT sudah memenuhi harapan KKNI?
- d. Matakuliah yang mempunyai substansi praktikum/praktik merupakan salah satu instrumen penilaian Borang PS (Instrumen 5.14). Apakah Bapak/Ibu sependapat dengan pentingnya matakuliah yang mempunyai substansi praktikum/praktik pada PS IPEM?
- e. Jika Bapak/Ibu menganggap penting mengenai perlunya matakuliah berpraktik pada kurikulum PS IPEM, matakuliah yang bagaimanakah yang sebaiknya dipraktikkan agar menunjang kompetensi lulusan PS IPEM?
- f. PS IPEM pada FISIP-UT telah memiliki program Continu Education (CE) yang sasarannya adalah para aparatur desa yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Mana diantara matakuliah yang dapat dikembangkan sebagai matakuliah berpraktik pada PS IPEM?
- g. Di samping topik tentang pembangunan, matakuliah apalagi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sebagai matakuliah berpraktik?

- h. Mohon Bapak/Ibu mengisi Form Penilaian Substansi Buku Kerja, serta memberikan saran bagi pengembangan lebih lanjut untuk diterapkan pada mahasiswa S1 IPEM. Form dan Bahan (Terlampir).

**B. PELAKSANA PEMBELAJARAN (Ka. UPBJJ/ BBLBA Koord : 2 orang)**

**Pertanyaan:**

- a. Pada tingkat operasional, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan jika PS IPEM mengembangkan/menerapkan Matakuliah berpraktik?
- b. Dari segi SDM yang tersedia di UPBJJ, ketersediaan pembimbing
- c. Bagaimana dengan administrasi/perizinan tempat praktik (Kantor Kepala Desa/Kecamatan/Kabupaten/DPRD)
- d. Bagaimana dengan penilaiannya? Sebaiknya seperti apa yang efektif?
- e. Hambatan-hambatan yang dialami dalam mengelola Matakuliah Berpraktik?

## LAMPIRAN 1. Biodata Ketua dan Anggota

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Anto Hidayat, S.IP, M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19750714 200112 1 001
5	NIDN	0014077501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 14 Juli 1975
7	E-mail	<a href="mailto:hidayat@ut.ac.id">hidayat@ut.ac.id</a>
8	Nomor Telepon/HP	081314418808
9	Alamat Kantor	Jalan Cabe Raya, Ciputat, Tangerang 15418
10	Nomor Telepon/Faks	(021) 7490941, Ex. 1907
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= orang; S2= orang.
12. Mata Kuliah yang Diampu		Pengantar Ilmu Pemerintahan
		Manajemen Pelayanan Umum
		Perbandingan Pemerintahan
		Kapita Selekta Manajemen Kepegawaian

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Pemerintahan	-
Tahun Masuk-Lulus	1994/2000	2006/2010	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perilaku Memilih Aparat Birokrasi Desa Pada Pemilu 1999 di Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang.	Hubungan Pengawasan Masyarakat Dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Haryanto, MA	Prof. Dr. Aries Djaenuri	-

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Implementasi <i>e-Government</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	LPPM-UT	Rp. 20.000.000,00
2	2012	Penelitian Kelembagaan Evaluasi Kualitas Pelayanan pada Puslata Universitas Terbuka	LPPM-UT	Rp. 10.000.000,00
3	2012	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	LPPM-UT	Rp. 20.000.000,00

4	2012	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Pada Mata Kuliah IPEM4318 Sistem Kepartaian dan Pemilu	LPPM-UT	Rp. 30.000.000,00
5	2012	Musrenbang Kecamatan: Kesepakatan Usulan Skala prioritas Pembangunan	LPPM-UT	Rp. 30.000.000,00
6	2013	Pengembangan Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	DIKTI	Rp. 68.000.000,00

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp.)
1	2010	Program Bantuan Sosial Universitas Terbuka Kepada Masyarakat Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
2	2011	Program Literasi Media Untuk Sekolah Dasar Kec. Pamulang, Kec. Gunung Sindur, dan Kecamatan Parung	LPPM-UT	-
3	2011	Penyuluhan tentang Administrasi Pemerintahan Desa Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur	LPPM-UT	-
4	2011	Program Penghijauan dan Penataan Lingkungan Situ Gintung, Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
5	2012	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buaran, Serpong, Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
6	2012	Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Kec. Pamulang, Tangerang Selatan	LPPM-UT	-
7	2012	Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Parung, Jawa Barat	LPPM-UT	-

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1	2009	Kajian Kemutakhiran Substansi Bahan Ajar Perguruan Tinggi Jarak Jauh	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud
2	2011	<i>The Role of Online Tutorial in Civic Education to Enhance Student Engagement to Citizenship</i>	Prosiding Konferensi ICDE ke 24, <i>International Council for Open and Distance Learning</i> – Universitas Terbuka

3	2011	Peran Masyarakat dalam Membangun Akuntabilitas Publik di Puskesmas	Prosiding Simposium Nasional II, ASIAN – Universitas Slamet Riyadi Surakarta
4	2012	Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan	Prosiding Seminar Nasional 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
5	2013	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	Prosiding Simposium Nasional II, ASIAN – Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Konferensi ICDE ke 24, <i>International Council for Open and Distance Learning</i> - Universitas Terbuka	<i>The Role of Online Tutorial in Civic Education to Enhance Student Engagement to Citizenship</i>	2-5 Oktober 2011, Nusa Dua Bali
2	Seminar Penelitian LPPM-UT	Implementasi <i>E-Government</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas	2012, UT <i>Covention Center</i> , Universitas Terbuka
3	Simposium Nasional Ke 2 Ilmuwan Administrasi Negara untuk Indonesia	Peran Masyarakat dalam Membangun Akuntabilitas Publik di Puskesmas	2012, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
4	Seminar Nasional FISIP-UT 2012	Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan	2012, FISIP-UT

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Materi Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia	2007	366 hal	Universitas Terbuka
2	Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintahan, dalam Buku Materi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia	2007	58 hal./599 hal	Universitas Terbuka

**H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Penerbit

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi)**

No.	Jenis Penghargaan Tahun	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Tangerang Selatan, 21-02- 2014  
Pengusul,

(Anto Hidayat )

**Identitas Anggota Peneliti (1)**

**IDENTITAS DIRI**

Nama : Dra. SITI AISYAH, M.Si  
NIP/NIK : 19680612 199903 2 001  
Tempat dan Tanggal Lahir : Solo, 12 Juni 1968  
Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan  
Status Perkawinan : ☒ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Duda/Janda  
Agama : Islam  
Golongan / Pangkat : IIIc/Penata  
Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka  
Alamat : Jl Cabe Raya Pondok Cabe  
Telp./Faks : (021) 7490941 Ext 1907  
Alamat Rumah : Vila Bogor Indah DD7/No.1 Ciparigi-Bogor  
Telp./Faks : 02518656966  
Alamat e-mail : aisyah@ut.ac.id

**RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1991	Sarjana	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Pemerintahan

2005	Magister	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Politik
------	----------	--------------------------------	--------------

### PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
Tahun 1999	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III angkatan V	Panitia Prajabatan	3 minggu
Tahun 1999	Pelatihan Akreditasi Tutor Universitas Terbuka (PATUT)	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2000	Pelatihan Penulisan Soal dan Analisis Item Butir Soal	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2000	Pelatihan pembuatan naskah tutorial berbasis komputer (CAI)	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2001	Pelatihan Program Power Point	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2002	Pelatihan Penulisan Naskah Radio dan TV	Universitas Terbuka	5 hari
Tahun 2003	Pelatihan Penelitian Kelembagaan	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2005	Pelatihan Penulisan artikel Majalah Komunika-UT	Universitas Terbuka	3 hari
Tahun 2008	<i>Assistance In Designing &amp; Planning A course In Instruksional Desain</i>	Universitas Terbuka	5 hari
Tahun 2009	Pelatihan TOEFL	Universitas Terbuka - ELS	3 bulan

### PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Sistem Pemerintahan Indonesia	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999-2014
Sistem Pemerintahan Desa	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999- 2014
Pembangunan Politik	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999- 2014
Perubahan Sosial dan Pembangunan	Strata 1	Ilmu Pemerintahan	1999- 2014
Pemerintahan Daerah	Strata 2	Magister Adm Publik	2005-2014
Pendidikan Kewarganegaraan	Strata 1	Ilmu Adm, Ilmu Komunikasi, dan Manajemen	2010-2014
Metodologi Penelitian Sosial	Strata 1	Ilmu Adm, Ilmu Komunikasi, dan Manajemen	2010-2014

### PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (Cetak dan NonCetak)	Semester/Tahun Akademik
-------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------



Sistem Pemerintahan Indonesia	Strata 1	Cetak,BMP	2005
Hubungan Pusat Daerah	Strata 1	Cetak,BMP	2008
Sistem Pemerintahan Desa (Edisi 2)	Strata 1	Cetak,BMP	2012

#### PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2006	Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan: Studi Kasus Di DPRD Kota Bogor 1999-2004	Ketua	Swadana
2006	Kelayakan Pengembangan Dan Implementasi Kit Tutorial Matakuliah IPEM4320 Siste Pemerintahan Indonesia Pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP UT	Ketua	<i>Teaching Grant-TPSDP-Dikti</i>
2007	Dinamika Lembaga Legislatif Lokal Pada Era Reformasi (Studi Kasus: Kinerja DPRD Di Kota Bogor dan Depok)	Ketua	Universitas Terbuka
2008	Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi	Ketua	Universitas Terbuka
2009	Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia MK Sistem Pemerintahan Indonesia	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Tracer Study UT	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok)	Anggota	Universitas Terbuka
2010	Pengembangan Masyarakat Perdesaan, Studi Kasus: Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah	Anggota	Universitas Terbuka
2010	Pengorganisasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Anggota	Universitas Terbuka
2011	Fungsi Penganggaran Pada DPRD (Studi Kasus Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja DPRD Kota Tangerang Selatan)	Ketua	Universitas Terbuka
2011	Pendidikan Politik oleh Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Kesadaran Politik Masyarakat	Anggota	Universitas Terbuka
2011	Implementasi <i>e-govorment</i> dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	Anggota	Universitas Terbuka
2012	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Matakuliah Sistem Kepartaian dan	Ketua	Universitas Terbuka

	Pemilu		
2012	Kualitas Layanan Distribusi Bmp Melalui Toko Buku Online Universitas Terbuka	Anggota	Universitas Terbuka
2012	Analisis Pola Layanan Pengaduan Masyarakat (Studi Kasus Unit Sentra Pelayanan Bagian Pelayanan Pengaduan Divisi Propam Mabes Polri)	Anggota	Universitas Terbuka
2013	Pengembangan Model Musrenbang Kecamatan Pada Perencanaan Pembangunan Di Kota Depok	Anggota	Hiber-Dikti
2013	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kota Depok	Ketua	PDP-Dikti

### KARYA ILMIAH \*

#### A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2005	BMP Sistem Pemerintahan Indonesia	Universitas Terbuka
2008	BMP Hubungan Pusat dan Daerah (Tim)	Universitas Terbuka
2011	BMP Sistem Pemerintahan Desa (Edisi 2) Tim	Universitas Terbuka
Maret 2006	Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan: Studi Kasus Di DPRD Kota Bogor 1999-2004	Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 2 No 1 Tahun 2006
September 2009	Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemda Kota Bandung Menurut PP No 41 Tahun 2007	Jurnal Widya Praja Vol XXXV No. 3, ISSN 0216-4019
September 2009	Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi	Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 No. 2 September 2009 ISSN 20859686
Juli 2010	Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik di Daerah Pemilihan Kota Depok (Peratanggungjawaban Anggota DPRD Kepada Konstituen)	Jurnal Pamong Praja, ISSN. 1829-8478 Edisi 17-2010
Sept 2013	Pengembangan Model Bahan Ajar Jarak Jauh Pada Matakuliah Sistem Kepartaian Dan Pemilu (Ipem4318)	Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh Vol; 17 No 2 Sept 2013, ISSN 1411-304X
Sept 2013	Peningkatan Peran Pemerintah Dan Masyarakat	Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol 2 Sept

	Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Dan Konservasi Lingkungan  Di Dieng Plateau	2013-ISSN 20859686
--	---	--------------------

\*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/olahraga

#### B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2006	Kelayakan Pengembangan Kits Tutorial Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia	Dikti-TPSDP
2007	Dinamika Lembaga Legislatif Lokal pada Era Reformasi	LPPM UT
2008	Mencermati Fenomena Pemekaran Dalam Konteks Otonomi Daerah	FISIP-UT
2009	Pengimplementasian Akuntabilitas Dalam Konteks Otonomi Daerah	FISIP-UT
2009	Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia	FISIP-UT
2009	Akuntabilitas pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilahan Kota Depok)	LPPM- UT
2010	Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Studi Kasus Pengembangan Masyarakat Perdesaan)	LPPM-UT
2011	Penguatan Modal Sosial: Upaya Mengatasi Pembangunan di Kawasan Dieng Plateau	FISIP-UT
2011	The Role of Higher Institution in Developing Human Resources in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka)	ICDE Conference 2012
2012	A Case Study on The Graduate's Readiness for Employment : A Tracer Study at Universitas Terbuka	Exlima Conference_UI 2012

#### C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2013	Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon	Jurnal Organisasi dan Manajemen Volume 9 Nomor 1 tahun 2013-ISSN 2085-9686

#### KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/peserta/pembicara
2006	Seminar Nasional Teaching Grant	Dikti _TPSDP	Pembicara

	2006: Kelayakan Pengembangan Kits Tutorial Matakuliah Sistem Pemerintahan Indonesia		
2007	Seminar Penelitian : Dinamika Lembaga Legislatif Lokal pada Era Reformasi	UT	Pembicara
2008	Seminar Ilmiah: Mencermati Fenomena Pemekaran Dalam Konteks	UT	Pembicara
2008	Seminar : Sistem Jaminan Kualitas sebagai Sarana Membangun <i>World Class University</i>	UT	Peserta
2008	Seminar Nasional FISIP: Membangun Layanan Akademik yang Berkualitas antar Institusi Penyelenggaraan Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Melalui Pemanfaatan e-learning	UT	Peserta
2008	Diskusi dalam rangka Dies Natalis Tri Windu; Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Masyarakat sebagai Rujukan Pengembangan Substansi Kajian di Perguruan Tinggi	UT	Peserta
2009	Seminar Ilmiah : Pengimplementasian Akuntabilitas Dalam Konteks Otonomi Daerah	UT	Pembicara
2009	Seminar Ilmiah: Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia Matakuliah Sistem Pemerintahan	UT	Pembicara

	Indonesia		
2009	Seminar Ilmiah: Meraih Keunggulan UT Melalui Peningkatan Kualitas Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi	UT	Pembicara
2009	Seminar Nasional FISIP-UT Dalam Rangka Lustrum-UT ke-5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	UT	Peserta
2010	Seminar Ilmiah: Meningkatkan Budaya Akademik Melalui Peningkatan Kompetensi Pelatihan	UT	Pembicara
2010	Seminar Ilmiah Intern FISIP-UT	UT	Peserta
2011	Seminar Nasional FISIP-UT: Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani	UT	Panitia
2011	Seminar Ilmiah Intern FISIP-UT: Penguatan Modal Sosial: Upaya Mengatasi Pembangunan di Kawasan Dieng Plateau	UT	Pembicara

#### KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2009	Penyuluhan tentang Peningkatan Motivasi	Kelurahan Karang Tengah, Kec. Gunung Puyuh Sukabumi
2010	Penyuluhan tentang Memanfaatkan Sampah Non Organik	Pondok Cabe, Tangerang Selatan
2011	Penyuluhan tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Cipanas Kabupaten Cianjur
2011	Melaksanakan Program Bantuan Sosial (Bansos) masyarakat Tangerang Selatan,	Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok

	Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir	Cabe Ilir, Tangerang Selatan

#### JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun 2003 s.d.2014
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan	Universitas Terbuka	Tahun 2006-2010
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan	Universitas Terbuka	Tahun 2010-2014
Dewan Redaksi Jurnal Organisasi dan Manajemen ISSN 2085-9686	Universitas Terbuka	Tahun 2010-2014

#### PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Peran	Tempat
2011	Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa	Penilai	UT
2011	Temu Keakraban Pokjar Mahasiswa-Alumni UT: Menuju Pembelajaran Mandiri Yang Cerdas	Narasumber	Pokjar Pemda Kab. Tegal

#### PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

#### ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
2010	Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia	Anggota
2011	Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Tangerang, 20 Februari 2014

Yang Menyatakan,

(Dra. SITI AISYAH,M.Si)  
NIP 19680612 199903 2 001

## Anggota Tim Peneliti (2)

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19710609 199802 2 001
5	NIDN	0009067107
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 09 Juni 1971
7	E-mail	<a href="mailto:rwulan@ut.ac.id">rwulan@ut.ac.id</a>
8	Nomor Telepon/HP	081381596171
9	Alamat Kantor	Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe. Pamulang 15418
10	Nomor Telepon/Faks	021-7490941 (2438)
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	ADPU 4442 Sistem Informasi Manajemen
		ADPU 4538 Manajemen Logistik Publik
		MKDU 4111 Pendidikan Kewarganegaraan

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UI	UI	
Bidang Ilmu	Administrasi Negara	Administrasi Publik	
Tahun Masuk - Lulus	1990-1996	2006-2008	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Ujian Komprehensif Tertulis	Reformasi Layanan Publik PT. PLN (Studi Kasus PT PLN Area Pelayanan Ciracas)	
Nama Pembimbing / Promotor	Dr. Bhenyamin Hoessein		

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2009	Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam Penciptaan Keunggulan Kompetitif dan	UT	20 Juta

		Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan)		
2	2009	Studi Penelusuran Lulusan UT	UT	20 Juta
3	2010	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)	UT	20 Juta
No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
4	2010	Gaya dan Peran Kepemimpinan dalam e-Business (Kasus Gramedia Shop Jakarta)	UT	20 Juta
5	2011	Sistem Koordinasi Logistik pada Organisasi Publik (Studi Kasus pada Pusat Layanan Bahan Ajar Universitas Terbuka)	UT	20 Juta
6	2011	Hubungan Sifat Relativitas Arsip dengan Teknik Penilaian (Studi Kasus Penilaian Arsip Audio Visual di Pusat Produksi Multi Media Universitas Terbuka)	UT	20 Juta

#### **D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2009	Sosialisasi FISIP UT	LPPM UT	
2	2010	Posyandu Griya Bhara Wira, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok	Masyarakat	
3	2011	Kegiatan Penatakelolaan Administrasi dan Kegiatan Kelompok PKK RT006/RW010 Sukamaju Baru, Tapos, Depok	Masyarakat	
4	2011	Majelis Taklim Ibu-Ibu Musholla At Taubah Perumahan Griya Bhara Wira, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok	Masyarakat	
5	2011	Program Bantuan Sosial (Bansos) Masyarakat Tangerang Selatan, Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir	Masyarakat	

*\*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya*

#### **E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)	-	2010



2	Gaya dan Peran Kepemimpinan dalam e-Business (Kasus Gramedia Shop Jakarta)	-	2010
3	Outsourcing Layanan Publik Pemerintah Daerah yang Otonom	-	2010
4	Peran Pemuda Wilayah Pedesaan dalam Pembangunan Demokrasi dan Pembangunan Karakter Bangsa	-	2011
5	The Role of Online Tutorial in Civic Education Course to Enhance Civic Engagement among Students	-	2011

#### **F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Hasil Penelitian: Meningkatkan Budaya Akademik melalui Peningkatan Kompetensi Penelitian		LPPM UT
2	Seminar Akademik FISIP UT		FISIP UT
3	Citizen Journalism dan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Semua		FISIP UT
4	24th World Conference in Indonesia on Expanding Horizon a New Approaches to ODL		ICDE
5	Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani		FISIP UT

#### **G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buklet Executive Summary Analisis SWOT D-IV Kearsipan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (Tim)	2005		
2	Naskah Akademik Pembukaan D-IV Kearsipan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (Tim)	2005		
3	Suplemen Manajemen Proyek (Edisi 1)	2008		
Dst.				

#### **H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
Dst.				

#### **I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5**

### **Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
Dst.				

### **J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara II Dosen Berprestasi se FISIP-UT	FISIP UT	2009
2	Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	2011

Tangerang, 20 Februari 2014  
Yang Menyatakan,

(FR Wulandari, S.I.P, M.Si)  
NIP 19710609 199802 2 001